

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia, laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena semakin banyaknya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik di pemerintah pusat maupun daerah. Meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas publik menyebabkan implikasi bagi pihak manajemen pemerintah mengkomunikasikan informasi keuangan berkualitas tinggi kepada masyarakat umum. Informasi pelaporan dengan kualitas laporan keuangan saling berkaitan jika pemangku kepentingan melihat laporan keuangan dari segi formalitas dan segi substansinya. Hal ini dapat diartikan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan laporan keuangan dapat dirasakan manfaatnya. Berkualitasnya laporan keuangan daerah apabila penerapannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah masih berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah memberikan informasi keuangan berkualitas tinggi, laporan keuangan berfungsi sebagai media di mana pemerintah bertanggung jawab atas kinerja keuangannya untuk publik. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan cerminan dari ketaatan pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib administrasi dan tertib asas (Setiandini dan Robinson, 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menjelaskan pemerintahan yang baik akan memenuhi dasar kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas transparansi, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Ada dua faktor kunci dalam mencapai taat kelola pemerintahan yang baik yaitu asas transparansi dan asas akuntabilitas. Dua asas tersebut saling memiliki keterkaitan karena tanpa transparansi tidak mungkin terdapat akuntabilitas dan transparansi tidak bermanfaat tanpa didukung asas akuntabilitas.

Asas transparansi merupakan asas yang memberikan informasi keuangan yang terbuka dan dapat diandalkan kepada publik. Berdasarkan asas tersebut, masyarakat (prinsipal) mempunyai hak untuk mengetahui secara penuh dan terbuka siapa yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan pemerintah, sebagai agen, dalam hal pengelolaan data keuangan, sumber daya yang dipercaya, dan kepatuhan terhadap hukum dari pemerintah. Landasan transparansi adalah adanya keterbukaan arus informasi, dimana pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi apa pun yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang diberikan juga harus cukup dan mudah dipahami. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap pemerintah, dan mengurangi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Asas akuntabilitas merupakan wujud kewajiban pihak pemerintah dalam menyajikan, melaporkan, menyampaikan tanggung jawab, serta mengungkapkan seluruh kegiatan atau aktivitas kepada masyarakat yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menghendaki pertanggungjawaban tersebut. Instrumen dasar akuntabilitas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan komitmen politik akan akuntabilitas. Pedoman tingkah laku, sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta sistem pengawasan dengan saksi yang jelas dan tegas termasuk dalam instrumen pendukung akuntabilitas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan dan dilaporkan oleh pemerintah daerah sebagai agen harus berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif yaitu, dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan ini merupakan prasyarat normatif untuk laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat penilaian setiap tahunnya berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan ada empat opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sistem akuntansi mengalami peralihan dari berbasis kas menjadi berbasis akrual dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan saat ini berjalan dengan sistem akuntansi berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menciptakan metrik kinerja yang baik dan untuk mendorong pengelolaan keuangan atau asset yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh efektivitas pengendalian internal pemerintah. Jika pengendalian internal ditingkatkan, hal ini akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan lembaga pemerintah dalam menyediakan laporan keuangan berkualitas tinggi untuk disajikan. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah harus didukung oleh struktur pengendalian internal yang kuat dan terfokus. Jika sistem pengendalian intern akan merugikan negara, seperti terjadinya kecurangan, korupsi, penyalahgunaan dana negara, pemborosan anggaran, dan penyajian laporan keuangan yang tidak memadai atau berkualitas rendah (Ayu dan Kusumawati, 2020).

Penerapan teknologi informasi berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta informasi akuntansi yang akan digunakan oleh pengelola publik untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap. Oleh karena itu diperlukan teknologi sistem informasi (*hardware* dan *software*). Teknologi informasi memberikan manfaat seperti pemrosesan atau transaksi dan produksi laporan yang lebih cepat, kemampuan menyimpan data dalam jumlah besar, pengurangan kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih murah. Namun, jika teknologi informasi tidak digunakan secara efisien, maka penerapan teknologi informasi akan memakan biaya yang besar (Enita, 2022).

Kurangnya pengetahuan, tertundanya penerapan sistem informasi akuntansi keuangan, pelaporan keuangan berbasis akrual, dan masih lemahnya fungsi audit internal menjadi beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil uji BPK RI tersebut, peneliti di Pemerintah Kabupaten Kudus harus melakukan kajian menyeluruh di salah satu kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada Pemerintah Daerah Kota Semarang bukan berarti tidak ada anomaly di wilayah tersebut. Penelitian ini dibatasi pada beberapa faktor, seperti penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian intern, motivasi kerja, dan pemanfaatan teknologi informasi, untuk menganalisis besarnya pengaruh dari masing-masing terhadap kualitas laporan pemerintah daerah.

Salah satu Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab atas kesiapan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah di Kabupaten Kudus. Kualitas laporan keuangan Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori cukup baik. Menurut pemberitaan di dalam <https://jatengprov.go.id/> pemerintah daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2023 dianugerahi penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian ke- 11 kalinya secara berturut-turut atas LKPD tahun 2022. Mempelajari kemampuan di Kabupaten Kudus dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 11 tahun berturut-turut (2012-2022) tentu menarik. Meski masuk dalam kategori opini WTP, LKPD Kabupaten Kudus masih menemukan informasi meresahkan.

Menurut pemberitaan di dalam <https://kuduskab.go.id/category/keuangan>. Pada tahun anggaran (2017-2021) ditemukan permasalahan di LKPD Kabupaten Kudus. BPK menemukan permasalahan selama lima tahun tersebut LKPD Kabupaten Kudus khususnya BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah serta kelemahan sistem

pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan di beberapa akun, seperti akun asset tetap dan akun asset lainnya. Penilaian opini didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian penyajian akun dengan SAP, pengungkapan yang cukup, kepatuhan pada aturan perundang-undangan, serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif. Akibatnya, penemuan masalah pada laporan keuangan yang dihasilkan setiap tahun harus diperbaiki. Semakin tinggi penilaian opini yang dicapai maka semakin banyak kriteria yang terpenuhi. Permasalahan yang terjadi pada LKPD Kabupaten Kudus harus segera diperbaiki karena kelemahan SPI dan ketidaktaatan terhadap hukum mungkin menjadi salah satu penyebab penolakan opini WTP. Selain berdampak pada penolakan berpendapat, WTP juga bisa berdampak pada buruknya kinerja jejak pendapat. Oleh karena itu, segala permasalahan yang terdapat pada OPD Kabupaten Kudus tentang LKPD, meskipun tergolong WTP maka harus diselesaikan agar LKPD pada tahun berikutnya dapat memperoleh opini WTP. Dalam artian memenuhi tujuan yang diharapkan tanpa ada catatan pemeriksaan dari BPK, dengan capaian penilaian yang diharapkan di atas 90% atau tidak terdeteksi permasalahan pada LKPD berikutnya.

Berbagai faktor mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Kudus. Salah satu elemen terpenting yang mempengaruhi kualitas laporan adalah penggunaan aturan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Tujuan diperkenalkannya SAP berbasis akrual di pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan integritas dan keandalan data yang diberikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian yang dilakukan oleh (Ayu dan Kusumawati, 2020) yang melakukan penelitian tentang dampak standar akuntansi

berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, ditemukan bahwa penerapan standar-standar ini mempunyai pengaruh penting dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Ternalemta et al., 2021) menyebutkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian oleh (Zulkifli, 2018) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu sistem pengendalian intern. Diharapkan adanya sistem pengendalian intern yang baik akan dapat meningkatkan keandalan data akuntansi yang dihasilkan. Sistem pengendalian intern diperlukan tidak hanya untuk pengendalian dalam akuntansi keuangan saja, namun juga untuk memberikan jaminan terlaksananya strategi yang direncanakan bagi instansi secara efektif dan efisien guna mencapai laporan keuangan yang baik. Hasil penelitian dari (Desi Lestari et al., 2022) sejalan dengan hasil penelitian dari (Ridzal et al., 2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Ramdany (2020) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu motivasi kerja. Motivasi merupakan alasan mengapa seseorang dapat melakukan aktivitas dan menyelesaikan segala tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Motivasi kerja membuat seseorang semakin bersemangat dalam menjalankan rutinitas pekerjaannya guna mencapai pekerjaan terbaiknya. Penelitian mengenai motivasi kerja yang dilakukan oleh (Trisnawati, 2021) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian dari (Trisnawati, 2021) sejalan dengan penelitian lainnya yakni Maharani et al., (2023) menyebutkan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Afni, 2021) menyebutkan bahwa motivasi kerja tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Perilaku sikap akuntan dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas kinerja yang terkomputerisasi, pengolahan informasi, pengolahan data, dan pemanfaatan kemajuan teknologi agar pelayanan publik mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Ternalemta et al., 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian dari (Ternalemta et al., 2021) juga sejalan dengan Desi Lestari et al., (2022) yang berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun hasil penelitian oleh (Sitepu, 2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yusriwanti dan Susanti, (2022) yang membahas mengenai pengaruh penerapan

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat penambahan satu variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Alasan penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi bisa membantu mempercepat pengolahan data, pengolahan informasi serta proses kerja secara elektronik pada proses transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan dan juga data yang diolah menggunakan bantuan teknologi (komputer) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Desi Lestari et al., 2022). Perbedaan selanjutnya adalah penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Inhil dan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus. Perbedaan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Yusriwarti dan Susanti, 2022) dilakukan pada tahun 2022 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2024.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, MOTIVASI KERJA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS”**.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkun dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ( $X_1$ ), sistem pengendalian intern ( $X_2$ ), motivasi kerja ( $X_3$ ), dan pemanfaatan teknologi informasi ( $X_4$ ) sebagai variabel independen, sedangkan kualitas laporan keuangan daerah (Y) sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang terjadi adalah raihan WTP (Wajar Tanpa Pengecuali) yang didapatkan kabupaten kudus ke sebelas kalinya atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang membuat peneliti ingin mengetahui pengaruh dari penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian intern, motivasi kerja, dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kualitas laporan keuangan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna sebagai referensi dalam mengabil keputusan yang tepat, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian intern, motivasi kerja, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguji apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh terhadap kualiatas laporan keuangan daerah.
2. Untuk menganalisis dan menguji apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualiatas laporan keuangan daerah.
3. Untuk menganalisis dan menguji apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kualiatas laporan keuangan daerah.
4. Untuk menganalisis dan menguji apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualiatas laporan keuangan daerah.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebgai berikut:

1. Bagi Pihak Akademis

Hal ini dimaksudkan agar temuan penelitian ini dapat memajukan teori, khususnya dibidang akuntansi sektor publik.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus

Dapat menjadikan masukan atau bahan acuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan laporan keuangan daerah.

### 3. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana dan informasi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kualitas laporan keuangan daerah.

